



PEDOMAN TEKNIS

E - KLIKPAJAK

(Elektronik Dengan Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar

Tahun 2025





**LAPORAN PROFIL INOVASI
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

E-KLIKPAJAK

**(ELEKTRONIK KEMUDAHAN LAYANAN INSTAN KU
BAYAR PAJAK)**

DISUSUN OLEH : BAPENDA EMPAT LAWANG

BAB 1

PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat menentukan kapasitas Fiskal pemerintah Daerah. Namun dalam hal praktiknya, masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak tepat waktu karena kendala teknis seperti keterbatasan akses layanan, informasi dan sistem pembayaran yang manual. Di Kabupaten Empat Lawang potensi penerimaan dari pajak daerah seperti pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, pajak restoran dan pajak hiburan belum tergali secara maksimal. Salah satunya penyebabnya adalah rendahnya kesadaran dan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Pelayanan secara konvensional seringkali menyebabkan antrean panjang, keterlambatan dan lemahnya monitoring. Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD Kabupaten Empat Lawang selama 5 tahun terakhir tidak lepas dari peran badan pendapatan daerah kabupaten Empat Lawang. Tujuan Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Empat Lawang adalah penguatan sistem, yang meliputi perbaikan sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem yang dilakukan yaitu sistem keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk kemudahan dalam proses pungutan, pembayaran dan sistem aplikasimanajemen pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas kerja aparat. Berdasarkan uraian di atas bahwa inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Empat Lawang harus ada peningkatan pendapatan asli daerah akan menjadi acuan dalam pengembangan pengelolaan pajak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan Daerah (PAD) yang sangat menentukan kapasitas

A. Latar Belakang

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi.

Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat.

Kabupaten Empat Lawang merupakan hasil dari adanya otonomi daerah yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memberikan tugas kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk dapat membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan Peningkatan PAD Melalui Pajak guna mendukung jalannya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.



Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu Kabupaten Baru dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik. Kabuapten Empat Lawang memerlukan peningkatan dan pengembangan fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan publik di sektor perpajakan sehingga diharapkan dapat mendukung perekonomian dan Pendapatan daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Melakukan terobosan dalam sistem Inovasi terbaru “*E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)”, inovasi ini memberikan kemudahan Pemungutan dan Pembayaran Pajak dengan memberikan Pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak, pajak merupakan bentuk kontribusi Masyarakat bagi pembangunan Kabupaten Empat Lawang Upaya Membangun kesadaran pembayaran Pajak di masyarakat. sebelumnya pembayaran Pajak di Kabupaten Empat Lawang di lakukan secara konvensional, melalui petugas pajak atau Pembayara Stor Pajak di Kantor Kantor Cabang Sumsel Babel yang telah di sediahkan di Kabupaten Empat Lawang, Selain Beberapa Inovasi yang sudah ada di Bapenda Kabupaten Empat Lawang melakukan pembaharuan Inovasi terbaru yaitu inovasi “*E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)” Melalui Kantor Pos, Indomaret dan Virtual account dengan hadirnya inovasi ini supaya dapat memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak serta Dengan hadirnya pembahuran inovasi ini penerimaan pajak Daerah lebih baik dan bisa optimal.

Upaya Membangun kesadaran pembayaran Pajak di masyarakat Bapenda Kabupaten Empat Lawang sudah memiliki gerai-gerai Pembayara Stor Pajak yang Telah di sediahkan Di Kabupaten Empat Lawang, Selain Beberapa Inovasi yang sudah ada Bapenda Kabupaten Empat Lawang Menambah Inovasi terbaru “*E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)” Kebaharuan dari inovasi ini adalah integrasi aktif wajib pajak cukup dengan NIK KTP wajib pajak bisa langsung mengetahui besaran tagihan, jatuh tempo serta mendapatkan panduan pembayaran digital.

B. Tujuan Inovasi

1. Meningkatkan kemudahan dan Kenyamanan wajib pajak dalam pembayaran pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan Penerimaan PAD dari sector pajak Daerah
3. Meningkatkan efisiensi pelayanan Pajak berbasis Dijital
4. Menekankan angka keterlambatan pembayaran pajak

5. Meningkatnya kepatuhan Pajak

C. Manfaat dari Inovasi

1. Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan informasi dan membayar pajak daerah;
2. Efisiensi pelayanan pajak meningkat dengan SDM dan teknologi yang sudah ada;
3. Komunikasi antara petugas dan masyarakat lebih terbuka dan edukatif;
4. Tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pajak daerah meningkat;
5. Target PAD lebih mudah dicapai karena sistem yang fleksibel dan modern;

Dengan hadirnya inovasi terbaru *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) dalam bidang pelayanan publik, dan inovasi sehingga Meningkatkan dan Memberikan Kemudahan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan Dengan di hadirkannya Inovasi ini dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui taat dalam Membayar Pajak.

Keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi pengelolaan pajak dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi pengelolaan pajak dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial (gengsi), kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting.

Keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu inovasi pengelolaan pajak dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Sebagai contoh para-adopter akan menilai apakah suatu inovasi pengelolaan pajak itu relatif menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang lainnya atau tidak. Untuk adopter yang menerima secara cepat suatu inovasi, akan melihat inovasi itu sebagai sebuah keunggulan.

D. Kecepatan Penciptaan Inovasi

Inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) telah menunjukkan penciptaan yang cepat dan efektif dalam mengatasi masalah rendahnya kapasitas daerah dalam merancang dan melaporkan inovasi. Dalam waktu yang relatif singkat, Bapenda Kabupaten Empat Lawang berhasil mendirikan dan menjalankan *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak), yang menyediakan pendampingan teknis dan bimbingan kepada Wajib Pajak, desa, dan stakeholders lainnya. Proses ini dimulai dengan identifikasi Inovasi, serta penyusunan narasi inovasi yang layak lapor.

Kecepatan penciptaan inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) didorong oleh pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti tim internal Bapenda, serta dukungan dari berbagai pihak terkait di Kabupaten Empat Lawang. Dengan menggunakan pendekatan berbasis klinik dan sesi bimbingan satu per satu (*one-on-one clinic*), *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) mengarahkan setiap pewajib pajak

untuk memperbaiki dokumen inovasi agar memenuhi standar yang ditetapkan. Program ini mampu beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing peserta.

Selain itu, kecepatan penerapan *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) didorong oleh kemudahan dalam proses penyusunan dan penguatan dokumen inovasi, yang dilakukan secara langsung dengan tim pembina. Dalam waktu singkat, *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) berhasil meningkatkan jumlah Wajib pajak daerah yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, inovasi daerah dapat tercipta dengan cepat dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan daya saing daerah.

BAB II KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN



Dengan tingginya potensi pajak yang belum tergarap akibat lemahnya sistem layanan, edukasi dan keterjangkauan kanal pembayaran, ketergantungan pada loket fisik menjadikan sistem pajak kurang inklusif dan adaptif terhadap kebiasaan wajib pajak semakin digital. “*E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)”, hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut, sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah daerah dan reformasi tata kelola pajak berbasis pelayanan. Inovasi ini mendukung misi peningkatan efisiensi layanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak tanpa harus menambah beban wajib pajak.

Berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE kerap disebut juga sebagai e-government. Dari uraian tersebut, dapat terlihat bagaimana keterkaitan antara inovasi digitalisasi dan SPBE/e-government. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan memanfaatkan teknologi.

B. DESAIN INOVASI

Inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)” dirancang untuk mengatasi masalah rendahnya Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak daerah di Kabupaten Empat Lawang. Sebelum adanya *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak), banyak Wajib Pajak dan masyarakat yang kesulitan dalam

Pembayaran Pajak. Hal ini menyebabkan Pendapatan Daerah Belum Maksimal. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan Pelayanan Publik Khususnya di Sektor Pajak Daerah.

Konsep inti dari desain ***E-Klikpajak (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)*** adalah Memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan metode Pembayaran Pajak. Program aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi pengguna pajak dalam melakukan tata cara pembayaran dengan mudah.

Fitur utama desain KDI mencakup:

1. E- Billing ; Membuat Kode biling dan pembayaran pajak secara online.
2. E-Faktur : Membuat dan mengelola faktur pajak, serta pelaporan SPT masa PPN.
3. Kolaborasi Lintas Sektor: Mengedepankan kerja sama antar berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat, untuk membangun budaya inovasi yang terus berkembang, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengimplementasian inovasi daerah.

Secara keseluruhan, desain ***E-Klikpajak (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)*** bertujuan untuk menciptakan sistem Metode Pembayaran Pajak yang lebih baik dan lebih efisien di Kabupaten Empat Lawang, dengan meningkatkan keterlibatan aktif semua pihak, baik itu pemerintah daerah, OPD, desa, maupun masyarakat. Dengan optimalisasi sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat, ***E-Klikpajak (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)*** berupaya mendukung pembangunan daerah melalui Pendapatan Pajak yang transparan, terukur, dan berkelanjutan. Program ini berkontribusi pada pengembangan indeks inovasi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal, sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Identifikasi Permasalahan dan Pembentukan Tim Inovasi

- Tim Bapenda Kabupaten Empat Lawang, bersama perangkat Daerah, melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi masalah utama terkait rendahnya Kesadaran tentang pajak daerah, terutama di sektor-sektor dengan potensi pajak yang belum tergali tetapi minim kesadaran tentang pajak.
- Data yang dikumpulkan meliputi potensi Pajak dari masing-masing OPD/desa dan masyarakat,
- Kepala Bapenda Empat Lawang menerbitkan Surat Tugas untuk pembentukan Tim inovasi, yang terdiri dari anggota Bapenda, narasumber pendamping, dan tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.
- Tim ini mengadakan rapat awal untuk merencanakan strategi, jadwal pelaksanaan inovasi, serta pembentukan komunitas penggerak inovasi di setiap desa/OPD.

2. Penyusunan SOP Program Inovasi dan Dokumentasi

- Tim menyusun SOP untuk pelaksanaan program Inovasi yang mencakup prosedur pembinaan, pelaporan, dan pencatatan hasil inovasi yang dilaksanakan.
- Modul edukasi tentang pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan inovasi disusun untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai inovasi yang terstruktur dan sistematis.

- Data penerima manfaat, kegiatan pengembangan inovasi, serta pencapaian yang dicapai dalam setiap tahap disusun dengan menggunakan sistem manual dan berbasis digital.
- Pelaporan dilakukan secara periodik dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa setiap kegiatan inovasi berjalan sesuai rencana.

Gambar I. SOP Pembayaran Pajak



3. Sosialisasi Inovasi dan Pelatihan Peserta

- Sosialisasi program Inovasi dilakukan melalui forum desa, pertemuan dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan OPD Perangkat Daerah.
- Pelatihan diberikan kepada peserta mengenai teknik penyuluhan inovasi dan Pelatihan ini juga mencakup penggunaan aplikasi untuk pencatatan hasil pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan.
- Uji coba sistem pelaksanaan dilakukan di beberapa OPD/desa terpilih untuk memastikan kelancaran program dan mengidentifikasi potensi masalah dalam pelaksanaan.

4. Implementasi Program Inovasi dan Pendokumentasian

- Program Inovasi diimplementasikan dengan memulai pelaksanaan inovasi di desa-desa dan OPD, dan masyarakat untuk memberikan arahan dan tata cara penggunaan inovasi.
- Diadakan sesi diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dan solusinya, dalam pelaksanaan Inovasi.
- Semua kegiatan didokumentasikan dengan rapi menggunakan form manual dan aplikasi yang memudahkan proses pelaporan dan memantau perkembangan program.

5. Monitoring Berkala, Evaluasi, dan Penyempurnaan Sistem

- Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan inovasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak terhadap peningkatan kualitas inovasi yang dihasilkan.
- Laporan evaluasi disusun oleh tim pelaksana untuk memastikan bahwa setiap Inovasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip yang ada dalam SOP.
- Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan terhadap SOP, termasuk memperbaiki metode pelatihan dan memperluas cakupan program untuk mencapai lebih banyak OPD/desa dan masyarakat.
- Penyempurnaan sistem dilakukan dengan memperkenalkan fitur-fitur baru dalam program Inovasi.

Dengan mengikuti SOP ini, Inovasi berhasil menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan dapat diimplementasikan dengan biaya rendah namun berdampak besar. Program ini tidak hanya meningkatkan inovasi yang terlupakan, tetapi juga memperkuat budaya inovasi di tingkat lokal dan memperkuat kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pemerintahan yang lebih baik dan berbasis bukti.

Inovasi **“E-Klikpajak (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak)”** dalam peningkatan pendapatan asli daerah Melalui Metode Kantor pos, indomaret dan Virtual account;

Pembayaran Pajak di Kantor Pos



Demi mendekatkan diri kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Empat Lawang, bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia, untuk mempermudah masyarakat dan wajib Pajak dalam melakukan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkintoran (PBB-P2) Artinya, masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak melalui kantor-kantor pos terdekat.

secara resmi me-launching pembayaran pajak PBB melalui kantor pos. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan antara Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dan PT. Pos Indonesia Persero pada tanggal 23 Agustus 2024,



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang menambah tempat pembayaran PBB, jadi masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran melalui kantor pos ini juga untuk menghindari pembayaran tunai yang berpotensi terjadi penyimpangan oleh petugas.

Gambar II.

Peresmian sekaligus sosialisasi Inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) Bapenda dan Penandatanganan Mou



Gambar II : Alur Langkah Pembayaran Pajak

Langkah Membayar Pajak :

- Datang Kantor Pos
- Tanjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- Setorkan Pembayaran

JENIS DAN SYARAT PENGAJUAN	
1. JUAL BELI	- Fotocopy KTP pembeli dan penjual - Fotocopy Sertifikat - Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya
2. WARIS	- Fotocopy KTP dan KK orang tua/waris - Fotocopy Sertifikat - Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya - Surat Keterangan Waris - Fotocopy Surat Kematian
3. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)	- Fotocopy KTP dan KK semua hak bersama - Fotocopy Sertifikat - Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya - Surat Keterangan Pembagian Hak Bersama (Akta APHB) - Fotocopy Surat Kematian
4. HIBAH	- Fotocopy KTP Pembeli dan Penjual - Fotocopy Sertifikat - Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya - Akta Hibah/ Surat Keterangan Hibah Disetujui Notaris (PAI)
5. Pemberian Hak	- Fotocopy KTP Pembeli dan Penjual - Fotocopy Sertifikat - Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya - Fotocopy SK BPN
6. LELANG	- Fotocopy KTP - Fotocopy Kuitansi Lelang - Fotocopy Risalah Lelang - Fotocopy Sertifikat - Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya

Bahkan, tidak hanya pembayaran PBB saja bisa dibayar melalui kantor pos. Sebab pihaknya mengelola 11 item pajak, mulai dari pajak restoran, hiburan, hotel, BPHTP, dan lainnya. " Dengan Adanya kerjasama ini masyarakat diberikan kemudahan dalam membayar Pajak Daerah, dengan bisa datang langsung ke PT Pos terdekat yang ada di Kabupaten Empat Lawang.

Dengan adanya kemudahan ini, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk terlambat membayar PBB. "Jangan sampai terlambat pembayaran pajaknya.



Pembayaran Pajak di Indomaret

Satu lagi inovasi pembayaran pajak daerah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang, kali ini berupa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atau yang selama ini lebih dikenal oleh masyarakat sebagai PBB, yang saat ini dapat dilakukan melalui gerai Indomaret di seluruh Indonesia. menyampaikan, “Inovasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah terus dikembangkan oleh Bapenda Kabupaten Empat Lawang sebagai wujud nyata dukungan terhadap Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD) dalam bidang Penerimaan Daerah, dan hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Bapenda Kabupaten Empat Lawang kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan kemudahan pembayaran Pajak Daerah yang aksesnya dekat kepada masyarakat”.

Indomaret menjadi salah satunya ritel yang melayani pembayaran transaksi penerimaan negara pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkerjasama dengan bank Sumsel Babel dalam hal layanan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik. Pembayaran PBB-P2 melalui gerai Indomaret merupakan salah satu perluasan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabuapten Empat Lawang memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam pembayaran pajak agar tercapinya target penerimaan pajak Bumi dan Bagunan P2 di Kabupaten Empat Lawang.

“Sebelumnya Bapenda telah menggandeng pihak perbankan yaitu Bank Sumsel Babel dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah melalu kanal-kanal pembayaran milik perbankan seperti ATM, L-online dan L-Smart milik bank Sumsel Babel.

Kami telah melakukan ujicoba pembayaran PBB melalui gerai Indomaret dan memeriksa pencatatannya pada aplikasi dan telah terintegrasi secara *realtime*, jadi masyarakat yang akan membayar PBB tidak perlu khawatir pembayarannya tidak tercatat“. “Masyarakat cukup membawa Nomor Objek Pajak nya (NOP) kekasir indomaret, setelahnya bukti pembayaran PBB berupa struk dapat disimpan, untuk kemudian ditunjukkan kepada satgas PBB yang berkunjung melakukan penagihan”.

Bapenda Kabupaten Empat Lawang tidak hanya sekedar melakukan penambahan kanal pembayaran Digital, namun Bapenda juga berupaya melakukan edukasi dan peningkatan literasi kepada masyarakat terhadap pemahaman terhadap kanal pembayaran digital yang mana hal tersebut akan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.



Pembayaran Pajak Virtual account

Warga Empat Lawang kini dapat merasakan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah secara online. Dalam upaya untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga,

pemerintah kabupaten Empat Lawang telah mengintegrasikan sistem pembayaran pajak daerah dengan metode virtual account yang terhubung langsung dengan berbagai bank ternama. Metode pembayaran ini memungkinkan warga empat lawang untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus mengunjungi kantor pajak atau mengantre dalam waktu yang lama. Dengan menggunakan kode unik yang terkait langsung dengan identitas pajak masing-masing warga, proses pembayaran menjadi lebih efisiensi dan cepat.

Salah satu keunggulan utama dari sistem ini adalah integrasinya dengan sejumlah bank terkemuka di Indonesia. Hal ini memungkinkan para wajib pajak untuk memilih bank yang mereka gunakan secara sehari-hari untuk melakukan pembayaran.

Pembayaran pajak online dengan metode Virtual account adalah langkah penting dalam memajukan layanan publik di era digital ini.

Bapenda Kabupaten Empat Lawang berkomitmen untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

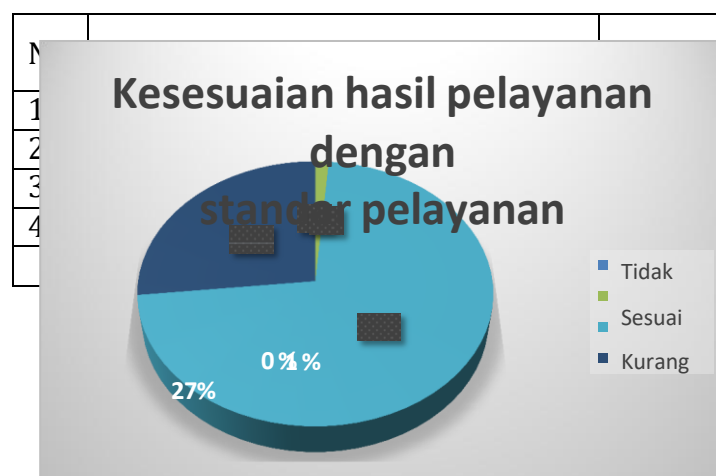
Tata cara dan Alur Pembayaran Pajak Dengan Virtual Account.

Dengan kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran pajak Virtual account yang terintegritas, warga Empat Lawang diharapkan dapat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Adapun hasil jawaban kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat, ruang lingkup



Kesesuaian Produk Pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.



Frekuensi	
F	%
0	0
2	1
08	72
10	27
50	100



BAB III

TAHAPAN PROSES PENCIPTAAN INOVASI

Tahapan dan proses pelaksanaan *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak), sebagai berikut :

1. Menyusun tim pelaksana dengan penanggung jawab Badan Pendapatan Daerah
2. Sosialisasi kepada internal dan koordinasi keintansi terkait pelayanan Inovasi
3. Tahapan Peresmian dan Penandatanganan Mou.

1. Tahap Inisiasi dan Identifikasi Permasalahan (Minggu ke-3 Januari 2025)

Pada tahap pertama, Bapenda Kabupaten Empat Lawang melakukan analisis terhadap masalah utama yang menghambat pengelolaan inovasi di daerah, seperti kurangnya pendampingan teknis, kesulitan dalam merancang dan melaporkan inovasi secara terukur, serta keterbatasan forum yang memfasilitasi transformasi ide menjadi inovasi yang memenuhi standar. Melalui survei dan wawancara dengan masyarakat serta pemetaan kebutuhan, ditemukan adanya kekurangan dalam proses pendokumentasian dan penyusunan inovasi yang terintegrasi. Berdasarkan temuan ini, keputusan diambil untuk mengembangkan inovasi yang bertujuan untuk mempercepat dokumentasi inovasi daerah dan memperkuat pendampingan teknis agar inovasi yang dihasilkan lebih terukur dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Tahap Perancangan Sistem dan Pengembangan Platform (Minggu ke-4 Januari s.d ke-1 Februari 2025)

Tim inovasi bekerja sama dengan Bapenda, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta berbagai OPD terkait untuk merancang sistem inovasi berbasis daring yang akan digunakan untuk memfasilitasi pendampingan, konsultasi, dan dokumentasi inovasi secara terstruktur. Dalam perancangan sistem ini, fitur-fitur seperti pemantauan progres inovasi, validasi ide, penggabungan dokumen inovasi, serta dashboard visualisasi capaian hasil inovasi disusun. Sistem ini juga mencakup integrasi dengan platform lain, seperti forum konsultasi lintas OPD, untuk memfasilitasi koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan dan dokumentasi inovasi. Penyusunan jadwal kegiatan pendampingan serta verifikasi ide inovasi juga dimulai untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan dan pengolahan data inovasi.

3. Tahap Sosialisasi dan Pembentukan Tim Konsultasi (Minggu ke-2 s.d ke-3 Februari 2025)

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Inovasi, Bapenda menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat, perangkat desa, serta OPD di seluruh kecamatan sasaran. Melalui forum konsultasi dan pertemuan antar OPD, sistem ini diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan inovasi yang terstruktur dan terukur. Pembentukan tim konsultasi dilakukan di setiap OPD untuk mengkoordinasikan aktivitas pendampingan dan mendukung proses validasi ide inovasi yang masuk. Selain itu, pelatihan diberikan kepada tim agar mereka dapat menggunakan sistem ini secara efektif dalam mendukung proses penciptaan inovasi daerah.

4. Tahap Uji Coba dan Implementasi (Minggu ke-4 Februari s.d ke-2 Maret 2025)

Uji coba dilakukan di beberapa OPD yang telah teridentifikasi sebagai wilayah dengan kebutuhan peningkatan dokumentasi inovasi yang rendah. Pada tahap ini, sistem Inovasi mulai beroperasi dengan mengumpulkan ide-ide inovasi dari masyarakat dan OPD melalui platform daring, serta mengadakan sesi konsultasi antara pihak terkait. Setiap kegiatan dan data yang terkumpul didokumentasikan dengan baik untuk memastikan prosesnya terpantau dan sesuai dengan harapan. Selama uji coba, evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala dalam proses pendampingan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem ini.

5. Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan (Minggu ke-3 Maret 2025)

Setelah implementasi uji coba, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem Inovasi, termasuk tingkat keterpaduan ide inovasi dengan dokumen perencanaan lainnya, serta peningkatan kecepatan dan akurasi proses validasi ide. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem ini disempurnakan dengan memperbaiki proses dokumentasi, meningkatkan kualitas pelatihan untuk tim pendamping, dan memperluas jaringan kerja sama dengan OPD dan pemangku kepentingan. Hasil evaluasi juga digunakan untuk memperbaiki sistem pelaporan agar lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak OPD dan desa di Kabupaten Empat Lawang.

Dengan tahapan ini, KDI diharapkan dapat menciptakan sistem dokumentasi inovasi daerah yang lebih cepat, akurat, transparan, dan terintegrasi, serta meningkatkan kolaborasi antar OPD untuk mewujudkan pembangunan yang lebih responsif dan berkelanjutan di Kabupaten Empat Lawang.

TAHAPAN INOVASI

TAHAPAN KEGIATAN	Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Inisiasi dan Identifikasi Masalah												
Tahap Perancangan Sistem dan Pengembangan Platform												
Tahap Sosialisasi dan Pembentukan Tim Konsultasi												
Tahap Uji Coba dan Implementasi												
Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan												

BAB IV

PENUTUP

Inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak), telah berhasil memperkenalkan model baru dalam mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah dan Meningkatkan Pelayanan Publik di sector perpajakan. Inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) yang diterapkan terbukti efektif dalam memberikan Pelayanan Publik bagi masyarakat.

Keberhasilan *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) dapat dilihat pada jumlah Pendapatan Pajak yang meningkat pesat, serta terbentuknya budaya Sadar Pajak yang lebih meningkat.

Secara keseluruhan, Inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak) telah membuka jalan bagi pengembangan ekosistem inovasi pelayanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Empat Lawang, yang memberikan dampak positif baik pada tingkat individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Inovasi ini menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan kapasitas inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Demikian profil inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak), Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 – 2025 dan diharapkan aplikasi inovasi *E-Klikpajak* (Elektronik Kemudahan Layanan Instan Ku Bayar Pajak), tetap berjalan sinergis sesuai rencana yang telah ditetapkan.

